BAB VI

Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Peredaran narkoba sebagai kejahatan transnasional (transnational crime) menimbulkan kerugian besar dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan global, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang rentan terhadap penyelundupan narkoba, Indonesia melalui Direktorat Interdiksi Narkoba menjalin kerja sama internasional dengan Australian Border Force (ABF) untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan perdagangan narkoba lintas batas. Kerja sama ini berlangsung dalam periode 2020–2024 dengan beberapa inisiatif strategis, antara lain K-9 Cooperation yang memanfaatkan anjing pelacak untuk mendeteksi narkotika, Capacity Building untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Hibah Cellebrite Responder Kiosk sebagai alat forensic digital dalam investigasi, serta Pertukaran Informasi untuk memperkuat koordinasi intelijen. Selain itu, DJBC dan ABF telah merancang rencana kerja sama jangka panjang guna memperluas upaya pemberantasan kejahatan lintas negara.

Beberapa rencana tersebut meliputi pembentukan Enforcement Working Group (EWG) sebagai forum koordinasi operasional, komitmen bersama dalam menindak penyelundupan barang ilegal, serta pengadaan anjing pelacak dari Detector Dog Program (DDP) Facility, Melbourne, hingga tahun 2026. Selain itu, kedua lembaga juga berencana menerapkan Mutual Recognition Arrangements (MRA) for Authorized Economic Operator (AEO) guna memfasilitasi perdagangan yang aman dan legal. Upaya peningkatan kapabilitas juga terus dilakukan melalui kolaborasi penyelenggaraan Capacity Building berupa workshop, pelatihan, dan sharing session, baik aspek teknis maupun non-teknis. Tidak hanya itu, DJBC dan ABF juga berkomitmen untuk memperluas manfaat kerja sama ini dengan kembali menyelenggarakan program Capacity Building bagi Timor Leste, sebagai bentuk kontribusi terhadap keamanan regional. Hasil kerjasama ini berupa penangkapan, penemuan dan penggalangan distribusi narkoba di KPPBC Ngurah Rai Bali dan KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta.

Kasus di KPPBC Ngurah Rai lebih beragam dengan menggunakan modus pengiriman paket, disembunyikan dalam bagasi, hingga disembunyikan dalam tubuh penumpang. Selaras dengan hal ini, beragam metode digunakan DJBC untuk mengidentifikasi dan melakukan pengawasan terhadap NPP seperti menggunakan informasi intelijen, hasil analisa citra x-ray, pemeriksaan barang, analisa hasil *Electronic Customs Declaration*, hingga profiling penumpang dan pelacakan K-9. Sedangkan di KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta biasanya ditemukan dengan metode Analisa X-Ray pada barang bawaan penumpang dan kiriman paket. Temuan dengan modus barang bawaan kebanyak diungkapkan dan ditindak lanjuti karena barang yang dibawah tidak dilaporkan ke pihak *customs* saat keberangkatan serta penumpang yang membawa tidak memiliki resep dokter sebagai bukti legalitas dan urgenitas pembawaan zat tersebut.

6.2 Saran

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (NPP), diperlukan serangkaian strategi perbaikan yang komprehensif. Pertama, kerja sama internasional perlu ditingkatkan, khususnya melalui pembentukan *Joint Task Force* dengan negara-negara lain, guna mengantisipasi perkembangan metode baru yang digunakan oleh sindikat dan organisasi narkoba internasional. Kedua, pengawasan analitis dan taktis harus diperkuat melalui pemeliharaan dan reformasi skema kerja anggota, sehingga kapasitas operasional dapat berjalan lebih efektif. Ketiga, perbaikan sistem analisis, pengembangan unit, serta sarana operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan respons dalam pencegahan masuknya NPP.

Keempat, pembaruan informasi dan pemetaan tingkat kerawanan wilayah harus dilakukan secara berkala, disertai dengan peningkatan spesifikasi area pengawasan serta optimalisasi distribusi personil dalam setiap tim operasi. Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, layak, dan merata di seluruh wilayah Indonesia harus dipastikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pengawasan. Terakhir, edukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba, modus penyebaran, serta perkembangan sindikat narkoba terbaru perlu diperluas

agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pencegahan peredaran NPP. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya penanggulangan NPP dapat berjalan lebih sistematis dan efektif.